



Pemerintah Provinsi  
Kalimantan Timur

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Berkah dan Rahmat-Nya, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat menuntaskan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2024. Laporan ini merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan upaya peningkatan kinerja dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Penyusunan LkjIP berpedoman pada beberapa peraturan perundangan, diantaranya pada Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki pandangan bahwa perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) harus dilakukan secara konsisten. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, evaluasi merupakan titik di mana organisasi dapat melihat kekuatan, progress yang telah diperoleh, serta aspek-aspek yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini merupakan agenda penting yang akan menjadi dasar perbaikan kinerja organisasi kedepan, terutama terkait tugas-tugas strategis sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis organisasi.

Kami berharap laporan ini memberi gambaran kepada pimpinan, mitra kerja, serta berbagai pihak yang menjadi pengguna layanan Bappeda mengenai posisi/kondisi saat ini, arah kerja, dan upaya perbaikan yang terus kami lakukan guna memberi pelayanan publik yang lebih baik kedepannya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif mendukung pelaksanaan tugas Bappeda serta seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Samarinda, Februari 2025

KEPALA BAPPEDA KALTIM



YUSLIANDO



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Sumber Daya Manusia ASN Bappeda Kaltim	5
Tabel 1.2	Profil Sumber Daya Manusia Non ASN Bappeda Kaltim	5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim	12
Tabel 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2023	13
Tabel 2.3.	Tugas dan dan Fungsi Utama serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kaltim	14
Tabel 2.4	Formulasi Perhitungan Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kaltim 2019 – 2023	15
Tabel 2.5	Sasaran Strategis, Indikator, & Target Kinerja Bappeda Kaltim 2023	18
Tabel 2.6	Realisasi Belanja Bappeda 2024 berdasarkan Jenis Belanja	18
Tabel 2.7	Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis	19
Tabel 3.1	Hasil Penilaian SAKIP Bappeda tahun 2022 – 2024 (berdasarkan tahun penilaian)	23
Tabel 3.2	Hasil Evaluasi & Rekomendasi terhadap SAKIP Bappeda Kaltim 2023	24
Tabel 3.3	Sasaran strategis Bappeda Kaltim tahun 2024	26
Tabel 3.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.5	Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja Tujuan 1	30
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya	30
Tabel 3.7	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi	31
Tabel 3.8	Nilai hasil perhitungan IPPD Kaltim tahun 2024	33
Tabel 3.9	Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (Tujuan 1)	34
Tabel 3.10	Aspek-aspek dalam indikator perhitungan kinerja	36
Tabel 3.11	Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 1	37
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 tahun penilaian dengan tahun dasar (2022)	38
Tabel 3.13	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi	39
Tabel 3.14	Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (sasaran 1)	41
Tabel 3.15	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis pertama	42
Tabel 3.16	Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 2	48
Tabel 3.17	Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 3)	49



Tabel 3.18	Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan target jangka menengah (Sas 2)	50
Tabel 3.19	Pendidikan & Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi personel Bappeda Tahun 2024	51
Tabel 3.20	Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sasaran 2	53
Tabel 3.21	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan & Rencana Aksi pendukung capaian sasaran strategis 2	54
Tabel 4.1	Informasi Capaian Program prioritas Tahun 2024	64





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Bappeda Kaltim Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023	4
Gambar 1.2	Beberapa Produk Utama kinerja Bappeda Kaltim – Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Periode Jangka Panjang, Menengah, & Pendek.	7
Gambar 1.3	Upaya Sinkronisasi Pendekatan Teknokratik – Politik dalam Proses Perencanaan & Penganggaran Guna Pencapaian Visi Pembangunan Daerah	9
Gambar 2.1	Dokumen Perencanaan Strategis Provinsi Kalimantan Timur dan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (BAPPEDA) 2024 - 2026	11
Gambar 2.2	Tujuan & Tema Pembangunan Kaltim dalam RPD tahun 2024 – 2026 (Pergub 16/2023)	11
Gambar 2.3	Rapat Evaluasi Kinerja Internal Bappeda yang dilakukan secara periodik (bulanan)	19
Gambar 2.4	Penggunaan E-Kinerja & E-SAKIP untuk untuk Monitoring Progress Kerja	19
Gambar 2.5	Hubungan Kerja Antar Unit Kerja Internal (Crosscutting Internal) dalam Upaya Pencapaian Sasaran Strategis 1	20
Gambar 2.6	Koordinasi Internal dan Penggunaan Kertas Kerja Daring dalam Upaya Efisiensi Waktu Penyelesaian Tugas (2)	20
Gambar 2.7	Hubungan Kerja Antar Unit Kerja Internal (Crosscutting Internal) dalam Upaya Pencapaian Sasaran Strategis 2	21
Gambar 2.8	Koordinasi Internal dan Penggunaan Kertas Kerja Daring dalam Upaya Efisiensi Waktu Penyelesaian Tugas (2)	21
Gambar 2.9	Hubungan Kerja/Kolaborasi Bappeda dengan Berbagai Mitra Pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran strategis organisasi	22
Gambar 2.10	Gambaran Kolaborasi Bappeda dengan Berbagai Mitra Pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran strategis organisasi	22
Gambar 3.1	Diskusi internal Bappeda dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP	25
Gambar 3.2	Diskusi Bersama Tim Inspektorat dalam Identifikasi Titik-titik Perbaikan dalam Implementasi SAKIP di Lingkungan Bappeda Kaltim	25
Gambar 3.3	Pemantauan kinerja bulanan & pembahasan rencana aksi Bidang Infraswil	28
Gambar 3.4	Pemantauan kinerja bulanan & pembahasan rencana aksi Bidang PPM	28
Gambar 3.5	Pemantauan kinerja bulanan & pembahasan rencana aksi Bidang PSDA	28
Gambar 3.6	Monitoring & Evaluasi Manajemen Risiko Organisasi	35
Gambar 3.7	Diskusi Manajemen Risiko bersama BPKP & Inspektorat	35
Gambar 3.8	Kendali Internal Manajemen Risiko Bappeda Kaltim	35
Gambar 3.9	Halaman Utama Website Bappeda Kaltim	47



Gambar 3.10	Diskusi bersama Inspektorat Kaltim terkait Penerapan SAKIP Perangkat Daerah	47
Gambar 3.11	Keikutsertaan Bappeda Kaltim dalam Pesta Rakyat Kaltim	48
Gambar 3.12	Monitoring & Evaluasi Kinerja Internal secara berkala oleh pimpinan organisasi	49
Gambar 3.13	Beberapa produk/output kinerja Bappeda tahun 2024	53
Gambar 3.14	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	59
Gambar 3.15	Perolehan Bhumandala Rajata dalam Bhumandala Award 2024	59
Gambar 3.16	Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024	60
Gambar 3.17	Kegiatan Monitoring & Evaluasi dan Kunjungan Lapangan	60
Gambar 3.18	Pendampingan Kunjungan Lapangan Bapak Pj. Gubernur Kaltim	61





## OVERVIEW CAPAIAN KINERJA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2024

- Tingkat capaian kinerja Bappeda tahun 2024:  
**105,29%**
- Realisasi anggaran tahun 2024:  
**91,42%**
- Efisiensi penggunaan anggaran:  
**13,87%**

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
<b>Tujuan 1:</b> Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	92	98.80	107.39
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indikator 1: % Konsistensi antara DOKRENBANGDA dengan DOKREN PD	92	96.43	104.81
	Indikator 2: Persentase Keselarasan antara DOKRENBANG Kab/Kota dengan DOKRENBANG Provinsi	91	92.04	101.14
	Indikator 3: % Prog. Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	80	88.00	110.00
<b>Tujuan 2:</b> Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Indikator 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78.5	78.74	100.31
	Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	85	85.82	100.96
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Indikator 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	79	80.90	102.41
	Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	85	86.38	105.99



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut, pimpinan organisasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas Bappeda Kaltim diselenggarakan melalui fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah provinsi, meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan;
- d. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

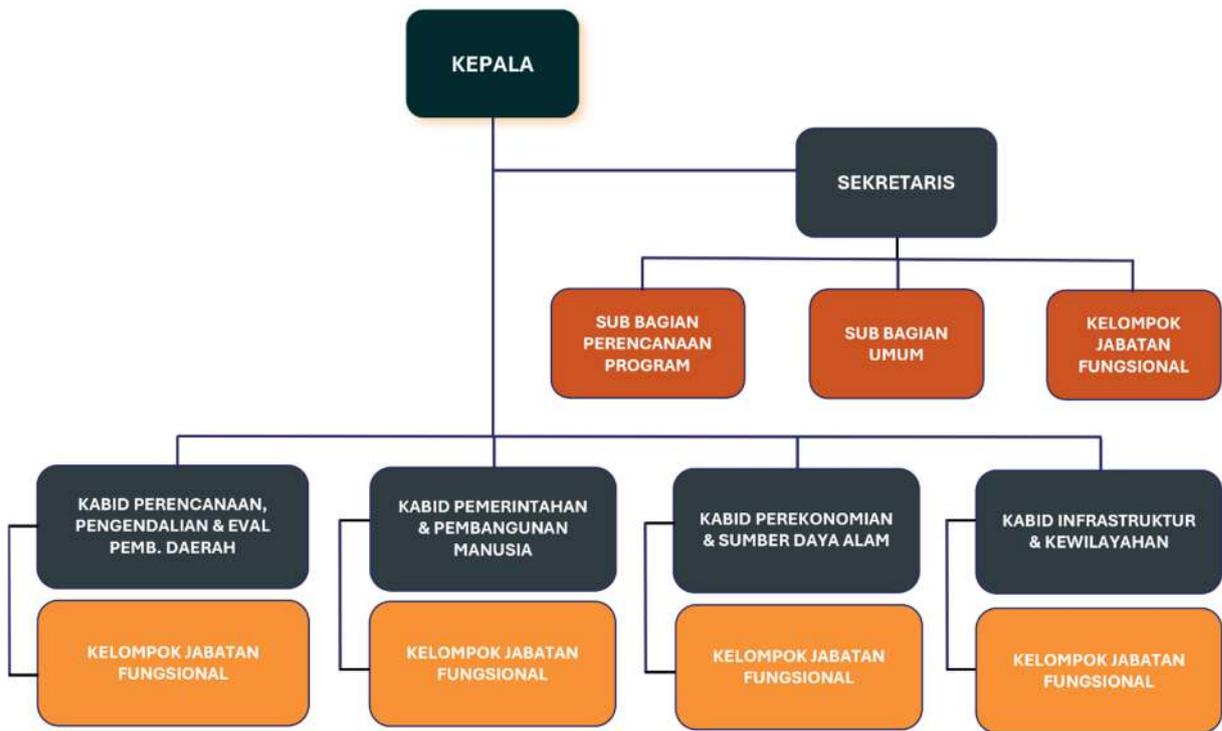


Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Kepala Badan memiliki beberapa uraian tugas, yakni:

- a) merumuskan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- f) melaksanakan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) melaksanakan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;
- h) melaksanakan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas badan;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Gubernur baik lisan maupun tertulis.

Susunan/struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat membawahkan:
  - o Subbagian Perencanaan Program;
  - o Subbagian Umum; dan
  - o Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f) Bidang Infrastruktur dan kewilayahan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kaltim Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2023

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Sumber Daya Manusia ASN mencakup berbagai elemen seperti pengetahuan, keterampilan, dan komitmen yang tentu mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan suatu instansi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan regulasi yang ada, tetapi juga kemampuan dan dedikasi personel Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik. Selain itu, Aparatur Sipil Negara yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berintegritas dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia sifatnya esensial untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Tabel 1.1 Profil Sumber Daya Manusia ASN Bappeda Kaltim

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Tingkat Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Kepala	1		1					1				
Sekretaris	1		1				1					
Ka. Bidang	3		3				3					
Ka.Subbag	1	1	1	1			2					
Jabatan Fungsional	12	2	2	12			7	8				
Staf Pelaksana	34	22	1	44	10	1	3	22	3	25		2
PPPK Jabatan Fungsional	4	3		7			1	6				
<b>JML ASN +PPPK</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>25</b>		<b>2</b>

Tabel 1.2 Profil Sumber Daya Manusia Non ASN Bappeda Kaltim

Jabatan	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
	L	P	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
<b>Non ASN</b>	<b>63</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Hingga akhir tahun 2024, Jumlah personel/pegawai yang bekerja di Bappeda Prov. Kaltim adalah sejumlah 165 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 84 (Delapan Puluh Empat) orang Tenaga PNS dan 81 (Delapan Puluh Satu) orang Pegawai Non PNS. Dari perspektif gender, tabel 1.1 dan 1.2 menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait perencanaan didominasi oleh pria, yakni sebesar 71,52% atau sejumlah 118 orang. Kontribusi wanita dalam pelaksanaan tugas di Bappeda Kaltim adalah sebesar 28,48% atau secara kuantitas berjumlah 47 orang. Secara ringkas dari tabel 1.1 dan 1.2 memberikan gambaran mengenai profil tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Dapat diobservasi bahwa mayoritas PNS memiliki tingkat pendidikan Strata 1 atau Sarjana dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara baru sejumlah tujuh belas orang yang memiliki kualifikasi pendidikan Strata 2 (Master). Kondisi ini diperlukan untuk perencanaan peningkatan kompetensi kedepan, terutama dalam distribusi pelaksanaan tugas serta perencanaan jenjang karir dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda kaltim.



Pegawai Non PNS juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas kedinasan bidang perencanaan. Saat ini, pegawai Non PNS didominasi oleh personel dengan kompetensi sarjana, diikuti dengan personel kompetensi Sekolah Menengah Atas (SMA). Kondisi ini juga dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan organisasi serta proses distribusi pegawai Non PNS guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sifat pekerjaan di lingkungan Bappeda Kaltim dapat dikatakan seragam. Sebagai instansi yang memerlukan kemampuan/kompetensi olah pikir, Bappeda membutuhkan Sumber Daya Manusia dengan tingkat pendidikan kategori pendidikan tinggi. Di samping itu, untuk pelaksanaan tugas reguler maupun sehari-hari, juga diperlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi terampil. Kolaborasi dari kedua profil SDM ini (pendidikan tinggi dan terampil) dapat membantu Bappeda dalam memetakan distribusi penugasan (yang juga mempertimbangkan kualifikasi pendidikan) serta kebutuhan peningkatan keterampilan dan kompetensi.

### **C. POSISI STRATEGIS BAPPEDA KALTIM**

BAPPEDA Kaltim hadir untuk melaksanakan urusan pemerintahan berkaitan dengan perencanaan. Pelaksanaan tugas organisasi utamanya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Bisnis Utama (core business) yang dijalankan akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek (tahunan), jangka menengah (lima tahunan) serta jangka panjang (20 tahun). Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing. Kedudukan dokumen perencanaan menjadi krusial karena merupakan awal atau hulu dari seluruh proses pembangunan, termasuk belanja daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah.

Perencanaan pembangunan perlu memiliki sifat adaptif terhadap dinamika pembangunan namun tetap mengacu pada visi misi yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam implementasi dan pelaksanaan tugas, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) harus menjadi pedoman utama untuk meningkatkan kinerja institusi yang bersifat inklusif, transparan, akuntabel, dst. Sifat atau prinsip berkelanjutan juga perlu dijaga dan dipastikan kehadirannya dalam setiap produk perencanaan pembangunan. Keberlanjutan ini juga mencakup pengertian bahwa substansi yang telah direncanakan perlu terus diupayakan implementasinya untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Bappeda memiliki posisi strategis dalam rangka menjamin terciptanya pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran yang pada akhirnya, pembangunan harus menunjukkan hasil berupa kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2025



Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) 2025 - 2029



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2025



Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kaltim Tahun 2024

Gambar 1.2 Beberapa Produk Utama kinerja Bappeda Kaltim – Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Periode Jangka Panjang, Menengah, & Pendek.



#### D. Permasalahan Utama – Isu Strategis

Beberapa tantangan atau permasalahan yang masih dihadapi oleh Bappeda Kaltim dalam menjalankan tugasnya di bidang perencanaan pembangunan antara lain:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari aspek kuantitas dan kualitas menyebabkan pembagian tugas untuk menjalankan tugas perencanaan pembangunan masih belum optimal
- 2) Manajemen tugas kedinasan dalam menghadapi dinamika pembangunan sehingga beberapa aspek perencanaan pembangunan belum terlaksana secara optimal, misalnya keterbatasan waktu dan personil untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara mendalam
- 3) Dinamika berbagai pembaharuan sistem maupun aplikasi baru yang tidak terprediksi memerlukan respon segera sehingga mengganggu jalannya tugas kedinasan yang telah terjadwal
- 4) Penggunaan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai fondasi atau basis utama dalam penyusunan rencana kerja hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk evaluasi/efisiensi tahun berjalan maupun periode maju (n+1) masih belum optimal
- 5) Kekuatan data baik spasial maupun statistik terkait (1) kualitas, kelengkapan, dan tingkat kedalaman substansi data (2) keberadaan Sumber Daya Manusia untuk melakukan analisis dan ekstraksi informasi (3) Proses pemutakhiran sistem atau aplikasi yang seringkali menghambat penyelesaian tugas
- 6) Beberapa data kinerja (terutama kinerja keuangan dan kinerja perngadaan) pada level detail tidak tersedia secara sistem sehingga memerlukan mekanisme kerja manual dan sifatnya berulang
- 7) Kompleksitas perhitungan indikator kinerja yang terindikasi kurang efisien. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan data hasil capaian pada level program dan kegiatan kerap diperoleh tidak sesuai dengan waktu kebutuhan

Perumusan isu strategis yang dihadapi organisasi dapat disarikan dari berbagai sumber. Selain diperoleh dari refleksi terhadap permasalahan yang ada, penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada berbagai tingkatan pemerintahan juga dapat menjadi bahan identifikasi dan perumusan isu strategis. Beberapa isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian organisasi dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan. Isu-isu tersebut yakni:



- 1) Upaya percepatan pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
- 2) Frekuensi dan kualitas koordinasi/kerja sama yang bersifat mutualisme dengan berbagai mitra kerja terutama terkait dengan kebutuhan data, informasi, dan analisis mengenai pembangunan di Kalimantan Timur
- 3) Merancang dan mengangkat kepentingan pembangunan Kalimantan Timur sebagai wilayah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah
- 4) Kolaborasi antara perencanaan dan penganggaran teknokratik dan politik hingga skala detail dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah jangka panjang
- 5) Integrasi dan sinkronisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins sebagai agenda nasional dengan rencana Pembangunan daerah
- 6) Integrasi dan sinkronisasi program kerja Kepala Daerah terpilih dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah jangka panjang
- 7) Strategi dan manajemen kerja dalam menghadapi dinamika pembangunan, terutama dalam penggunaan berbagai aplikasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi



Gambar 1.3 Upaya Sinkronisasi Pendekatan Teknokratik – Politik dalam Proses Perencanaan & Penganggaran Guna Pencapaian Visi Pembangunan Daerah



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2024

### A. Rencana Strategis BAPPEDA 2024 - 2026

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan elemen penting dalam meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah menekankan bahwa perencanaan strategis menjadi dasar atau acuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Tujuan dan sasaran perangkat daerah harus sesuai dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Tahun 2024 – 2026, Kalimantan Timur berada dalam periode transisi pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, untuk periode 2024 – 2026, Kalimantan Timur menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023.

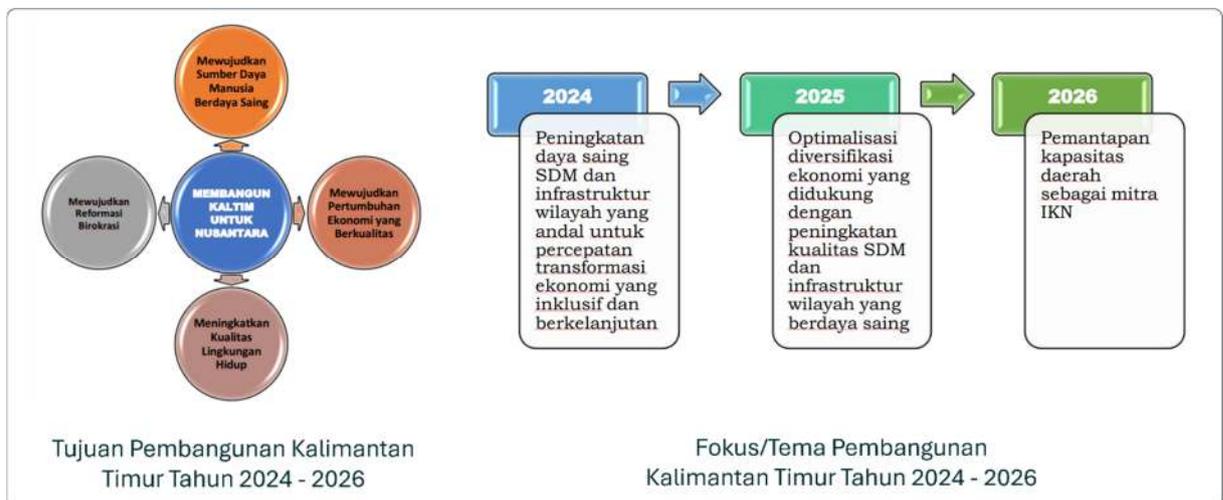
Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda tahun 2024 – 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023. Dokumen ini menjadi dasar penilaian kinerja organisasi pada level strategis. Dalam upaya pencapaian target strategis, dokumen RENSTRA juga telah menuangkan kinerja organisasi hingga level sub. Kegiatan, yakni kinerja yang menunjukkan keluaran-keluaran kinerja yang mendukung capaian kinerja yang lebih tinggi. Target strategis sebagaimana dimaksud mencakup dua tujuan dan dua sasaran perangkat daerah. Masing-masing komponen (tujuan dan sasaran) telah dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur capaian/keberhasilan dan progress kinerja organisasi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Terdapat dua indikator tujuan serta lima indikator sasaran yang akan menjadi arah pergerakan organisasi hingga tahun 2026. Target kinerja strategis beserta program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam tabel 2.2



Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda 2024 - 2026

Gambar 2.1 Dokumen Perencanaan Strategis Provinsi Kalimantan Timur dan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (BAPPEDA) 2024 - 2026



Gambar 2.2 Tujuan & Tema Pembangunan Kaltim dalam RPD tahun 2024 – 2026 (Pergub 16/2023)

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran (Satuan)	Capaian 2024	Target		
			2024	2025	2026
<b>Tujuan 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)</b>	<b>98,80</b>	<b>92,00</b>	<b>92,50</b>	<b>93,00</b>
Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah (%)	96,43	92,00	94,00	96,00
	2 Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi (%)	92,04	91,00	93,00	95,00
	3 Persentase program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	88	80,00	85,00	90,00
<b>Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas</b>	<b>1 Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (poin)</b>	<b>78,74</b>	<b>78,50</b>	<b>79,30</b>	<b>80,01</b>
	<b>2 Indeks kepuasan masyarakat pemerintah daerah (Indeks)</b>	<b>85,82</b>	<b>85,00</b>	<b>85,50</b>	<b>86,00</b>
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	1 Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)	80,90	79,00	80,00	81,00
	2 Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks)	86,38	85,00	85,50	86,00

Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
			B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	D. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			E. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			F. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	G. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			H. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			I. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			J. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah
			K. Administrasi Umum Perangkat Daerah
			L. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			M. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			N. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tabel 2.3 menggambarkan tugas, fungsi, serta Indikator Kinerja Utama Bappeda Kaltim.

Tabel 2.3. Tugas dan dan Fungsi Utama serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kaltim

Tugas	:	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;</li> <li>b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan;</li> <li>c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan;</li> <li>d. pengarahannya pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>e. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;</li> <li>f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;</li> <li>g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;</li> <li>h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;</li> <li>i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;</li> <li>j. pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah;</li> <li>k. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan</li> <li>l. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.</li> </ol>
IKU	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>2. Persentase Konsistensi Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah;</li> <li>3. Persentase Keselarasan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Kab/Kota dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi;</li> <li>4. Persentase Program Prioritas yang Mencapai Target;</li> <li>5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ;</li> <li>6. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.</li> </ol>



Tabel 2.4 Formulasi Perhitungan Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kaltim 2024 – 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
<b>Tujuan 1:</b> Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = $(\text{Jumlah program dalam RKPD} : \text{Jumlah program dalam RPJMD/RPD}) \times 100\%$	Range skor penilaian PPD terhadap Dokumen Kabupaten/Kota:  $\leq 5,22 = 50$ ; $5,23-5,72 = 70$ ; $5,73-6,22 = 80$ ; $6,23-7,22 = 90$ ; $\geq 7,23 = 100$ .  Range skor penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional):  $17-24 \text{ indikator} = 100$ ; $13-16 \text{ indikator} = 90$ ; $10-13 \text{ indikator} = 80$ ; $8-10 \text{ indikator} = 70$ ; $< 8 \text{ indikator} = 50$
		b. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD = $(\text{Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA}) : (\text{Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD}) \times 100\%$	
		c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = $(\text{Jumlah program dalam RENSTRA}) : (\text{Jumlah program dalam RPJMD/RPD}) \times 100\%$	
		d. Menghitung kesesuaian antara APBD dengan RKPD = $(\text{Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD}) : (\text{Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD}) \times 100\%$	
		e. Menghitung capaian program prioritas = $(\text{Jumlah Program Prioritas pembangunan daerah yang mencapai target indikator yang telah ditetapkan}) : (\text{Jumlah seluruh Program Prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan}) \times 100\%$	
		f. Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota (Penilaian terhadap dokumen)	
		g. Hasil penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional)	
		<b>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah =</b> $(20\%*a)+(20\%*b)+(20\%*c)+(10\%*d)+(10\%*e)+(10\%*f)+(10\%*g)$	
<b>Sasaran 1:</b> Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<b>Indikator 1:</b> Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	a. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD = $(\text{Target tujuan, sasaran, dan program dalam RKPD}) : (\text{Target tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD/RPD}) \times 100\%$	
		b. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RENJA = $(\text{Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RENJA yang sama dengan RKPD}) : (\text{Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja dalam RKPD}) \times 100\%$	



Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
		<p>c. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD = (Jumlah program dan indikator dalam RENSTRA yang sama dengan RPJMD/RPD) : (Jumlah program dan indikator dalam RPJMD/RPD) x 100%</p> <p>d. Menghitung kesesuaian antara tujuan RENSTRA PD dengan sasaran RPJMD/RPD = (Jumlah sasaran RPJMD/RPD yang didukung oleh tujuan Renstra PD) : (Jumlah sasaran RPJMD/RPD) x 100%</p> <p><b>Persentase Konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah = (30%*a)+(30%*b)+(20%*c)+(20%*d)</b></p>	
	<p><u>Indikator 2:</u> Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi</p>	<p>a. Jumlah Rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah x 100%</p> <p>b. Jumlah Kabupaten/Kota yang prioritas pembangunannya selaras dengan Provinsi : Jumlah seluruh Kabupaten/Kota x 100%</p> <p>c. Jumlah indikator sasaran provinsi yang mendapat dukungan program dari kabupaten/kota : jumlah indikator sasaran provinsi x 100%</p> <p><b>Persentase Keselarasan antara dokumen rencana pembangunan Kabupaten/Kota dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi = (50%*a)+(25%*b)+(25%*c)</b></p>	
	<p><u>Indikator 3:</u> Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target</p>	<p>Jumlah Indikator Program Prioritas yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator program prioritas x 100%</p>	



Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Keterangan
<u>Sasaran 2:</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah	<u>Indikator 1:</u> Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Menggunakan hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah	
	<u>Indikator 2:</u> Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11) + (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + (Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)	
	b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi		
	c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111		
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah = Jumlah NRR Tertimbang x 25</b>			



## 1) Target Sasaran Strategis Bappeda Kaltim tahun 2024

Tabel berikut menggambarkan komponen pengukuran kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kaltim.

Tabel 2.5 Sasaran Strategis, Indikator, & Target Kinerja Bappeda Kaltim 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Presentase konsistensi antara dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana perangkat daerah	%	92,00
		Presentase keselarasan antara dokumen rencana pembangunan kabupaten/kota dengan dokumen rencana pembangunan provinsi	%	91,00
		Presentase program prioritas pembangunan yang mencapai target	%	80,00
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Poin	79,00
		Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Indeks	85,00

## 2) Anggaran Belanja tahun 2024

Guna mencapai sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam dokumen kinerja, Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp72.308.109.244. Alokasi tersebut berasal dari sumber dana:

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	:	48.803.759.355
Dana Alokasi Umum (DAU)	:	19.963.195.072
Dana Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)	:	3.541.154.817

Realisasi belanja Bappeda tahun 2024 adalah sebesar 91,42%, dengan rincian berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Realisasi Belanja Bappeda 2024 berdasarkan Jenis Belanja :

No	Jenis Belanja	Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	64.065.528.394	58.347.865.632,20	91,08%
2	Belanja Modal	8.242.526.850	7.753.590.329	94,07%
Jumlah		72.308.109.244	66.101.455.961,20	91,42%



Sementara, dari aspek sasaran strategis, realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Sasaran Strategis

SASARAN - PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI ANGGARAN
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah</b>			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.451.795.092	46.392.783.905	93,81
<b>Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>			
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	9.421.066.733	8.141.981.268	86,42
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.435.247.419	11.566.690.788	86,09
<b>Realisasi anggaran Bappeda Kaltim tahun 2024</b>			<b>91,42%</b>



Gambar 2.3 Rapat Evaluasi Kinerja Internal Bappeda yang dilakukan secara periodik (bulanan)



Gambar 2.4 Penggunaan E-Kinerja & E-SAKIP untuk Monitoring Progress Kerja



## C. Hubungan Lintas Perangkat Daerah dan Antar Unit Kerja dalam Pencapaian Kinerja Strategis

Sebagaimana disajikan dalam struktur organisasi, Bappeda terdiri atas satu sekretariat dan empat bidang. Seluruh unit kerja tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas guna mencapai target-target strategis organisasi. Mekanisme kerja sama/kolaborasi tersebut disajikan dalam informasi *crosscutting* kinerja berikut:



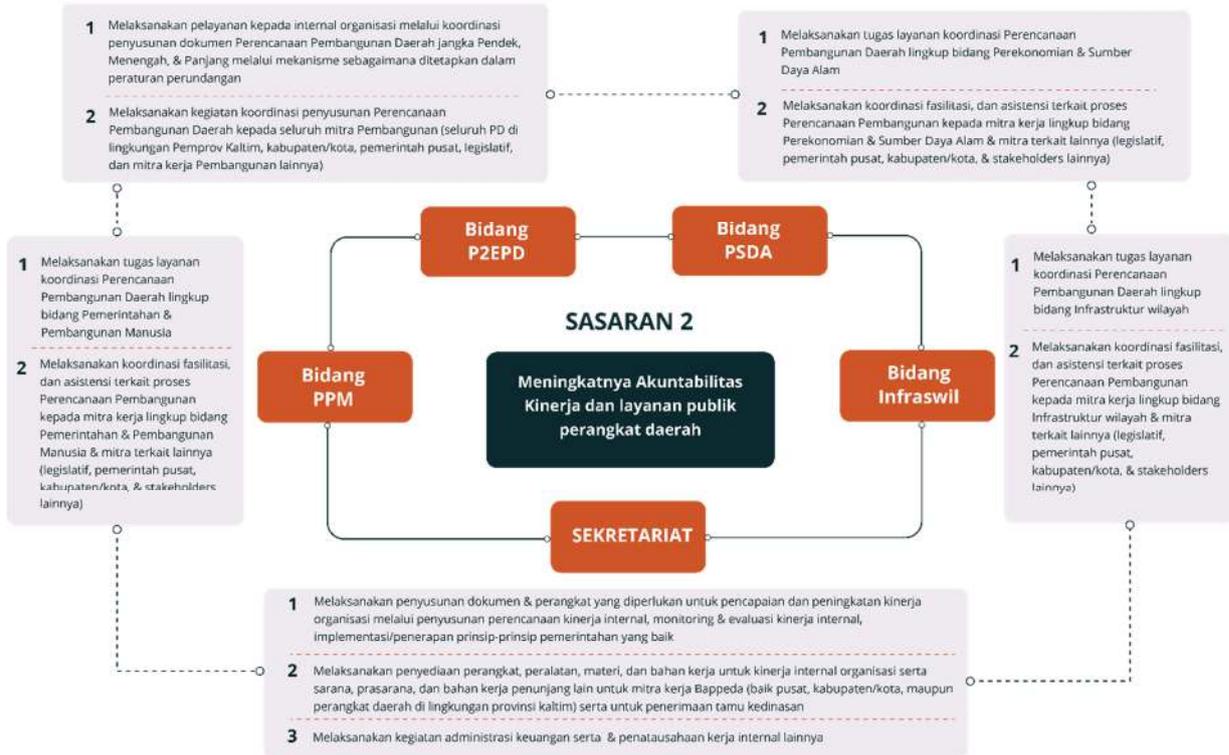
Gambar 2.5 Hubungan Kerja Antar Unit Kerja Internal (Crosscutting Internal) dalam Upaya Pencapaian Sasaran Strategis 1



Gambar 2.6 Koordinasi Internal dan Penggunaan Kertas Kerja Daring dalam Upaya Efisiensi Waktu Penyelesaian Tugas (2)



### Upaya Pencapaian Sasaran Strategis Organisasi Lintas Unit Kerja Internal



Gambar 2.7 Hubungan Kerja Antar Unit Kerja Internal (Crosscutting Internal) dalam Upaya Pencapaian Sasaran Strategis 2



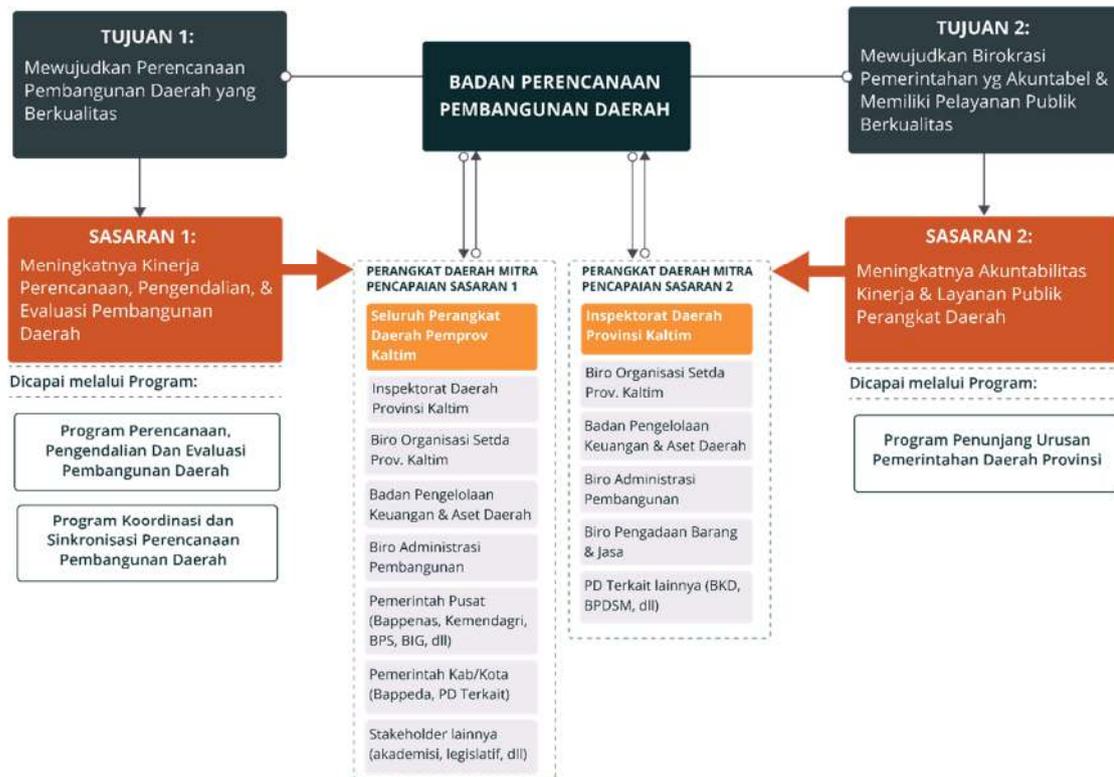
Kertas Kerja Penapisan Isu-Isu Strategis Organisasi 2025 - 2029

SUMBER PEMELAAHAN	INDIKASI-CALON ISU STRATEGIS	BIDANG P2EPD												PENGAPLIKASIAN	
		PENGARUH TERHADAP CAPAIAN ORGANISASI?		TUGAS & TANGGUNG JAWAB PD?		DAMPAK PADA PUBLIK		DAYA UNGKUT THDP PEMS. DAERAH		HAMPU BERKENDALIRANI?		PRIORITAS SAKSI POLITIK?			TOTAL NILAI P2EPD
		SIG/TKR	NILAI	YA/TKR	NILAI	SIG/TKR	NILAI	SIG/TKR	NILAI	JAWABAN	NILAI	YA/TIDAK	NILAI		SIG/TKR
PERDA No. 11 tahun 2024 tentang RFPD Kaltim	Pencapaian target target Pembangunan jangka panjang terutama dalam upaya transformasi dominasi pemerintahan Kaltim	Signifikan	3	Ya	3	Signifikan	0	Signifikan	2	Ya	3	Bukan	0	3	Signifikan
RFPD Teknis 2025 - 2029	Kebijakan perencanaan pembangunan sebagai titik krusial tata kelola pemerintahan yang baik dan daya saing daerah	Signifikan	3	Ya	3	Signifikan	0	Signifikan	2	Ya	3	Bukan	0	3	Signifikan
PERDA No. 1 tahun 2023 tentang RTRWP Kaltim 2023 - 2045	Inklusi program utama pembangunan dalam RTRWP Kaltim terakup dan terakomodir dalam program-program pembangunan jangka pendek	Tidak Signif	0	Ya	3	Signifikan	0	Agak Signifikan	2	Ya	3	Bukan	0	3	Tidak Signif
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2020 - 2024	Pencapaian target target pembangunan secara inovatif dan berbasis perspektif maju serta temutakhir	Signifikan	3	Ya	3	Signifikan	0	Signifikan	2	Ya	3	Bukan	0	3	Signifikan
	Responsif terhadap dinamika pembangunan hingga skala global	Signifikan	3	Ya	3	Signifikan	0	Signifikan	2	Tidak	0	Bukan	0	4	Signifikan
KLHS RFPD Kaltim 2025 - 2029 & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDOs)	Peningkatan kompetensi jabatan fungsional pemencana	Signifikan	3	Ya	3	Tak Sig	0	Agak Signifikan	2	Ya	3	Bukan	0	4	Signifikan
Visi dan misi Kepala Daerah terpilih	Pencapaian target target SDGs secara normal atau perlu upaya pengoptasi	Tidak Signif	0	Ya	3	Signifikan	0	Signifikan	2	Ya	3	Bukan	0	4	Tidak Signif
Peraturan Perundang-undangan	Alokasi belanja secara tepat sasaran untuk pencapaian misi dan misi (pembangunan) kepada daerah terbelah, khususnya peningkatan Sumber Daya Manusia	Signifikan	3	Ya	3	Signifikan	0	Signifikan	2	Ya	3	Ya	3	6	Signifikan
	Secara strategis memegang kembali terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh berbagai kajian pembangunan	Signifikan	3	Ya	3	Tak Sig	0	Agak Signifikan	2	Ya	3	Bukan	0	4	Signifikan
	Responsif dan agile terhadap proses kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan baik skala nasional maupun global	Signifikan	3	Ya	3	Tak Sig	0	Tak Signif	2	Ya	3	Bukan	0	3	Signifikan
Implementasi Transisi Energi pada Skala Global	Mengantisipasi dinamika pembangunan seiring praktik penurunan demand komoditas unggulan utama Kaltim	Tidak Signif	0	Ya	3	Signifikan	0	Signifikan	2	Ya	3	Ya	3	5	Tidak Signif

Gambar 2.8 Koordinasi Internal dan Penggunaan Kertas Kerja Daring dalam Upaya Efisiensi Waktu Penyelesaian Tugas (2)



Selain kerja sama internal antar unit kerja, pencapaian sasaran strategis juga dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra kerja lainnya. Mitra kerja tersebut antara lain adalah dengan perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Secara garis besar, hubungan kerja lintas perangkat daerah dan dengan pemangku kepentingan lainnya disampaikan pada gambar 2.8



Gambar 2.9 Hubungan Kerja/Kolaborasi Bappeda dengan Berbagai Mitra Pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran strategis organisasi



Gambar 2.10 Gambaran Kolaborasi Bappeda dengan Berbagai Mitra Pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran strategis organisasi



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Bappeda tahun 2024

##### 1) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda tahun 2024 (kinerja tahun 2023) menunjukkan kinerja organisasi bergerak ke arah positif. Secara keseluruhan, nilai AKIP Bappeda meningkat dari kategori BB menjadi A, dengan nilai 80,90. Dari lima komponen penilaian, hanya komponen perencanaan kinerja yang mengalami penurunan poin/nilai, yakni dari 24,00 pada tahun 2023 menjadi 22,00 pada tahun 2024. Detail pencapaian nilai tiap komponen disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Hasil Penilaian SAKIP Bappeda tahun 2022 – 2024 (berdasarkan tahun penilaian)

Komponen Penilaian	2022		2023		2024	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
Perencanaan kinerja	30	25,28	30	24,00	30	22,20
Pengukuran kinerja	25	16,56	20	14,80	20	18,00
Pelaporan kinerja	15	13,56	10	8,00	10	9,50
Evaluasi internal	10	4,87				
Pencapaian sasaran/kinerja org.	20	14,29				
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0		20	14,40	20	16,00
Capaian Akuntabilitas Kinerja	0		20	15,20	20	15,20
<b>NILAI HASIL EVALUASI</b>		<b>74,56</b>		<b>76,40</b>		<b>80,90</b>
<b>KATEGORI PENILAIAN</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>A</b>

Pencapaian ini mencerminkan upaya Bappeda dalam meningkatkan akuntabilitas, dan kualitas kinerja dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kategori penilaian A, Bappeda berhasil menunjukkan bahwa sistem pengelolaan kerjanya semakin matang, serta menjadi indikator positif bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



2) Tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Pada penilaian SAKIP tahun 2024, Bappeda Kaltim memperoleh tiga rekomendasi dalam upaya perbaikan implementasi SAKIP, Rekomendasi tersebut yakni:

1. Dalam pencapaian kinerja memperhitungkan efisiensi penggunaan anggaran
2. Berupaya maksimal untuk meningkatkan nilai pada seluruh komponen penilaian SAKIP
3. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tindak lanjut organisasi (Bappeda) terhadap rekomendasi dari penilaian SAKIP tahun 2024 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Hasil Evaluasi & Rekomendasi terhadap SAKIP Bappeda Kaltim 2023

No	Poin Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sudah/Belum
1	Dalam pencapaian kinerja memperhitungkan efisiensi penggunaan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan melakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam upaya mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kinerja</li> <li>2. Mengupayakan belanja yang lebih efisien namun dapat mencapai target yang telah ditetapkan</li> <li>3. Melakukan identifikasi belanja yang dapat dilakukan efisiensi dan melakukan realokasi pada belanja lain yang dapat menunjang pencapaian kinerja</li> <li>4. Melakukan proses pergeseran anggaran dari anggaran yang dapat dilakukan efisiensi ke belanja yang lebih produktif dan mempercepat pencapaian kinerja</li> </ol>	<b>Telah dilaksanakan.</b> Belanja tahun 2024 menunjukkan progress efisiensi.
2	Berupaya maksimal untuk meningkatkan nilai pada seluruh komponen penilaian SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi terhadap hasil evaluasi hingga level kriteria dan memberikan perhatian terhadap titik-titik krusial penilaian SAKIP</li> <li>2. Diskusi internal terhadap upaya peningkatan implementasi SAKIP dan mengidentifikasi langkah langkah yang perlu dilakukan.</li> </ol>	<b>Telah dilaksanakan.</b> Identifikasi pada seluruh kriteria dan melakukan analisis pada titik-titik yang perlu dilakukan perbaikan
3	Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan diskusi internal dalam menyusun strategi peningkatan kinerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas</li> <li>2. Memastikan prinsip/aspek akuntabilitas kinerja dipahami dan dijalankan dengan penuh komitmen oleh seluruh personel Bappeda</li> </ol>	<b>Telah dilaksanakan.</b> Hasil identifikasi terhadap kriteria-kriteria yang mengalami

No	Poin Rekomendasi	Tindak Lanjut	Sudah/Belum
		3. Menyusun target-target realistis terhadap kriteria yang dapat diupayakan perbaikannya 4. Mendorong pencapaian target-target strategis organisasi	penurunan nilai dan melakukan diskusi langkah perbaikan.



Gambar 3.1 Diskusi internal Bappeda dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP



Gambar 3.2 Diskusi Bersama Tim Inspektorat dalam Identifikasi Titik-titik Perbaikan dalam Implementasi SAKIP di Lingkungan Bappeda Kaltim



## B. Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2024

Berdasarkan RENCANA KERJA (RENJA) & RENJA PERUBAHAN BAPPEDA Provinsi Kaltim tahun 2024, terdapat tiga sasaran strategis yang menjadi arah pelaksanaan kinerja organisasi. Tabel 3.3 menggambarkan ketiga sasaran strategis tersebut.

Tabel 3.3 Sasaran strategis Bappeda Kaltim tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator kinerja	Target 2024	Realisasi	Tk. Capaian (%)
<b>TUJUAN 1:</b> Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	92	98,80	107,39
<b>SASARAN:</b> Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	% Konsistensi antara DOKRENBANGDA dengan DOKREN PD (%)	92	96,43	104,81
	% Keselarasan antara DOKRENBANG Kab/Kota dengan DOKRENBANG Provinsi (%)	91	92,04	101,14
	% program prioritas pembangunan yang mencapai target (%)	80	88,00	110,00
<b>TUJUAN 2:</b> Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	Tidak menjadi IKU BAPPEDA			
<b>SASARAN:</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (poin)	79	80,90	102,41
	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah (indeks)	85	86,38	105,99

## C. Analisis capaian kinerja Bappeda Kaltim Tahun 2024

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Rencana Kerja dan dokumen anggaran organisasi tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tahun 2024 merupakan periode/tahun pertama dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2024 – 2026.



Penyusunan analisis capaian kinerja organisasi (BAPPEDA KALTIM) berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan lampiran II peraturan tersebut, evaluasi dan analisis kinerja dilakukan untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Laporan kinerja tahun 2024 ini akan melakukan analisis dan evaluasi capaian kinerja pada satu tujuan dan dua sasaran kinerja strategis organisasi. Tujuan kedua, yakni "Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas" tidak dilakukan evaluasi dan analisis mengingat tujuan ini merupakan tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 20206 sehingga evaluasi akan menjadi bagian dari evaluasi RPD 2024 – 2026. Secara garis besar, pengukuran capaian kinerja dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dinilai;
- b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dinilai dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
- c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dinilai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan;
- e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan realisasi capaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yakni:

Tabel 3.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 tahun 2017



Gambar 3.3 Pemantauan kinerja bulanan & pembahasan rencana aksi Bidang Infraswil



Gambar 3.4 Pemantauan kinerja bulanan & pembahasan rencana aksi Bidang PPM



Gambar 3.5 Pemantauan kinerja bulanan & pembahasan rencana aksi Bidang PSDA



## Tujuan 1:

### Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Tujuan pertama dari kinerja Bappeda tahun 2024 – 2026 menggambarkan upaya organisasi untuk menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tepat sasaran. Maksud dari tepat sasaran dalam konteks ini adalah dapat menjawab tantangan/permasalahan pembangunan daerah serta mengarahkan pembangunan menuju visi yang telah ditetapkan. Pengukuran terhadap kesuksesan pencapaian tujuan ini dilakukan melalui indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah. Indeks ini diformulasikan melalui tujuh kriteria, yakni:

1. Tingkat kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD
2. Tingkat kesesuaian antara RENJA dengan RKPD
3. Tingkat kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD
4. Tingkat kesesuaian antara APBD dengan RKPD
5. Tingkat capaian program prioritas
6. Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota (Penilaian terhadap dokumen)
7. Hasil penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional)

Dari kriteria tersebut tampak bahwa kinerja perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan dokumen. Kinerja perencanaan juga termasuk memastikan bahwa program/kegiatan yang telah direncanakan memperoleh alokasi anggaran yang sesuai untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sementara itu, aspek PPD merupakan hasil penilaian dari Penghargaan Pembangunan Daerah. Nilai yang digunakan adalah hasil PPD baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota memberi gambaran mengenai kinerja Pemerintah Provinsi dalam melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara untuk hasil penilaian PPD Provinsi menggunakan hasil penilaian dari Pemerintah Pusat. Ketujuh kriteria penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tersebut memiliki bobot atau faktor penentu masing-masing yang akan mempengaruhi nilai akhir dari indeks.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama penggunaan IPPD sebagai indikator dari tujuan strategis organisasi. Tahun 2022, saat dilakukan penyusunan RENSTRA 2024 – 2026, dilakukan perhitungan baseline dan diperoleh angka 90,50. Tahun 2024, sesuai dokumen RENSTRA, ditargetkan nilai IPPD mencapai 92,00. Pada akhir tahun 2024, dilakukan perhitungan IPPD dengan nilai akhir 98,80. Nilai ini menunjukkan capaian kinerja untuk tujuan pertama adalah mencapai 107,39% (realisasi kinerja sangat tinggi).

Tabel beserta uraian selanjutnya akan memberikan gambaran secara mendetail mengenai aspek-aspek analisis yang harus dilakukan dalam melakukan evaluasi kinerja.



## 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 3.5 Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja Tujuan 1

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	92,00	98,80	107,39

Capaian kinerja tujuan strategis pertama Bappeda Kaltim tahun 2023 mencapai 107,39%. Nilai ini masuk kategori kinerja "Sangat Tinggi."

## 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Tujuan 1)

Indikator	2022 (Baseline)	2023	2024	
			Target	Realisasi
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	90,50	Belum menggunakan IPPD sebagai indikator	92,00	98,80

Tahun 2023 (n-1), kinerja organisasi belum menggunakan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) sebagai indikator kinerja. Indeks ini baru digunakan pada Renstra 2024 – 2026. Perhitungan kondisi awal (baseline) dilakukan pada tahun 2022 dan memperoleh nilai 90,50. Tahun 2024, nilai IPPD Kaltim mencapai 98,80. Peningkatan nilai ini menunjukkan perbaikan pada berbagai aspek perencanaan pembangunan terutama sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPD, RKPD) dengan dokumen rencana kerja (RENJA) dan strategis (RENSTRA) perangkat daerah, serta sinkronisasi dengan kabupaten/kota. Nilai indeks ini juga menggambarkan bahwa terdapat sinkronisasi yang baik antara dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama untuk penganggaran program-program prioritas. Kualitas perencanaan pembangunan provinsi juga tergambar dari hasil/nilai PPD yang menunjukkan beberapa aspek penentu kualitas dokumen perencanaan pembangunan provinsi sudah berada di atas rata-rata nasional.



### 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bappeda 2024 – 2026)

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Tujuan 1)

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	92,00	98,80%	Capaian 107,39%

Pada periode atau tahun pertama perencanaan jangka menengah 2024 – 2026, tujuan pertama mencapai kinerja 107,39%, masuk dalam kategori kinerja "Sangat Tinggi". Kondisi capaian kinerja yang sangat tinggi ini juga terkonfirmasi dengan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) untuk Provinsi Kaltim. Tahun 2024, nilai IPPN Kaltim telah mencapai 93,11. Nilai ini meningkat dari nilai tahun 2023, yakni 88,13. IPPN dan IPPD memiliki mekanisme/metode perhitungan berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara setara. Namun, dapat memberikan gambaran mengenai kualitas perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur.

### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Terdapat beberapa hal atau faktor yang mendorong keberhasilan Bappeda dalam mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi sinkronisasi dokumen maupun dari sisi hasil atau capaian program pembangunan, sebagaimana tergambar dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPD). Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tujuan organisasi adalah:

- 1) **Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran.** Dengan diterapkannya sistem ini, proses sinkronisasi menjadi jauh lebih mudah. Secara langsung, sistem akan mengarahkan komponen perencanaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Komponen tersebut adalah Program, Kegiatan, hingga Sub kegiatan. Bahkan, SIPD telah memfasilitasi kebutuhan cascading sehingga penempatan komponen pada dokumen perencanaan telah tersusun secara tersistem. Kondisi ini sangat memudahkan perencana dalam memastikan sinkronisasi komponen perencanaan dan memastikan komponen tersebut sesuai dengan penjenjangan kinerja.
- 2) **Kesepahaman dan koordinasi yang semakin baik antara perencana pembangunan dengan perencana yang melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.** Kondisi ini memberikan ekosistem positif dalam pertukaran informasi, update penjadwalan dan substansi antara Bappeda dengan seluruh perangkat daerah.



- 3) **Kesepahaman dan koordinasi yang semakin baik antara perencanaan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.** Kondisi ini semakin membuka jalan agar visi dan target pembangunan provinsi selaras dan memiliki sinkronisasi yang baik serta memperoleh dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.
- 4) **Koordinasi yang efektif serta keselarasan substansi antara proses perencanaan dan penganggaran.** Target yang ditetapkan dalam proses perencanaan telah diupayakan untuk didukung dengan alokasi anggaran. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara cermat dan teliti agar penggunaannya tepat sasaran.
- 5) **Proses pemantauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara konsisten.** Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja. Pemantauan/evaluasi telah dilaksanakan secara berkala sehingga jika ditemui kendala, dapat segera diselesaikan dan apabila kinerja program berbeda dari yang direncanakan, langkah antisipatif dapat dilakukan.
- 6) **Kemampuan perencana dalam melakukan pendampingan dan pengendalian penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.** Target kinerja Pemerintah Daerah diturunkan menjadi beberapa komponen aksi melalui klasifikasi program, kegiatan, hingga sub kegiatan. Perencana (personil Bappeda Kaltim) perlu memastikan bahwa target strategis pemerintah daerah hingga visi misi daerah didukung oleh kinerja strategis perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)

Salah satu kendala dalam penggunaan SIPD adalah sistem yang kerap mengalami ketidakstabilan. Kondisi ini menyebabkan mekanisme dan timeline kerja terganggu karena harus menunggu sistem kembali bekerja secara stabil. Selain dari kendala teknis tersebut, belum ditemui adanya kendala yang bersifat krusial maupun signifikan dalam upaya pencapaian nilai IPPD Kaltim. Sebagaimana disampaikan pada informasi faktor pendorong, penggunaan SIPD menjadi hal positif dalam mendukung keselarasan dokumen perencanaan pembangunan baik antar periode perencanaan maupun antara perencanaan pembangunan hingga turunan ke dokumen perencanaan perangkat daerah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, IPPD yang dihitung oleh Kalimantan Timur memiliki tujuh variabel/aspek perhitungan. Masing-masing variabel memiliki tingkat signifikansi (bobot) tertentu. Tabel 3.8 memberikan informasi mengenai hasil perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kaltim tahun 2024:



Tabel 3.8 Nilai hasil perhitungan IPPD Kaltim tahun 2024

Indikator	Aspek/Variabel Perhitungan	Bobot	Nilai
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD	20	100
	Tingkat kesesuaian antara RENJA dengan RKPD	20	100
	Tingkat kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD	20	100
	Tingkat kesesuaian antara APBD dengan RKPD	10	100
	Tingkat capaian program prioritas	20	88
	Hasil penilaian PPD Kabupaten/Kota (Penilaian terhadap dokumen)	10	100
	Hasil penilaian PPD Provinsi (Proporsi indikator provinsi diatas rata-rata nasional)	10	100
	<b>NILAI IPPD</b>		

Alternatif solusi untuk perbaikan kinerja kedepan:

Banyak hal yang dapat dibenahi dan ditingkatkan untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kedepan. Terkait dengan kendala sistem, telah dilakukan koordinasi yang intensif dengan Tim Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga. Instansi yang menjadi koordinator penggunaan SIPD secara nasional. Namun, kendala ini masih sering muncul/terjadi. Kondisi ini bersifat uncontrollable mengingat Pemerintah Daerah adalah user, bukan pemilik atau pihak yang dapat membenahi sistem tersebut. Kedepannya, akan dilakukan koordinasi secara intensif dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan tim Kementerian Dalam Negeri agar apabila terdapat kendala dalam penggunaan SIPD, dapat segera diberikan solusi.

Selain itu, perlu terus diperdalam dan diperhatikan aspek-aspek penentu IPPD. Beberapa aspek sifatnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali Bappeda meskipun Bappeda dapat terus berupaya mendorong pencapaian suatu target. Aspek tersebut adalah terkait capaian program prioritas. Perlu koordinasi yang kuat dan perhitungan, prediksi yang akurat/presisi untuk memastikan perangkat daerah dapat mencapai target program prioritas yang telah ditetapkan baik pada dokumen perencanaan maupun penganggaran.



### 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dalam suatu upaya dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat efisiensi sumber daya dapat dinilai dari kuantitas sumber daya yang digunakan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai efisien jika hasil yang diharapkan dapat tercapai (secara kualitas dan kuantitas) dengan menggunakan sumber daya dengan kuantitas minimal. Tabel 3.9 menggambarkan faktor yang akan dikalkulasi untuk memperoleh gambaran efisiensi penggunaan sumber daya.

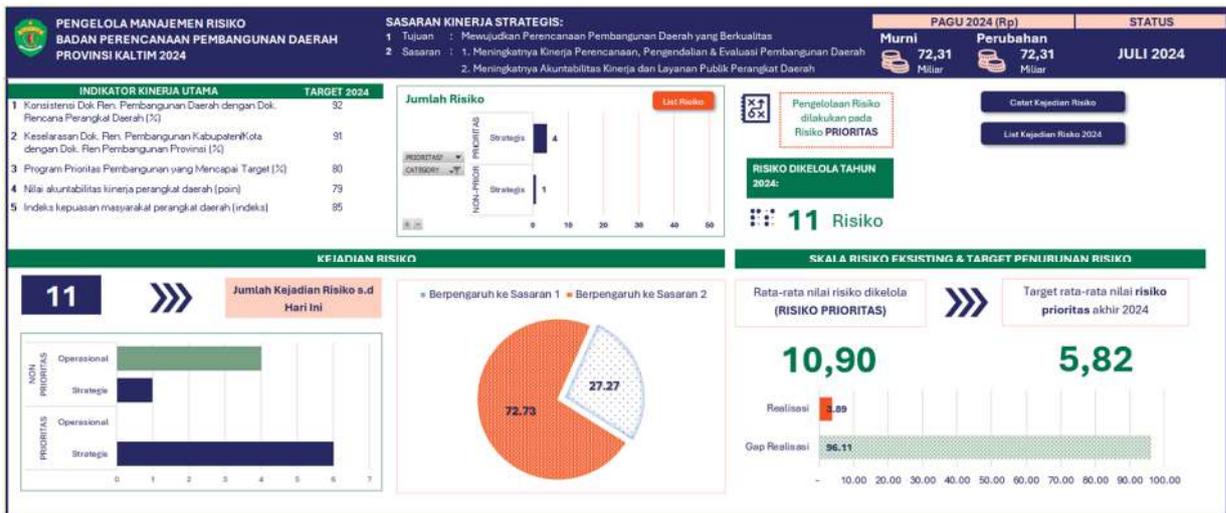
Tabel 3.9 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (Tujuan 1)

Tujuan	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kinerja anggaran (%)	Efisiensi (%)
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	107,39%	86,23%	21.16%

Anggaran untuk melaksanakan tujuan pertama pada tahun 2024 adalah sebesar 22,856,314,152. Dari nilai tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar 19,708,672,056 atau sebesar 86,23%. Sementara itu, capaian kinerja mencapai 107,39%, sehingga untuk pencapaian tujuan pertama, terdapat efisiensi sebanyak 21,16%.

### 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pertama adalah program/kegiatan yang berada di bawah penjenjangan sasaran pertama. Sehingga untuk pembahasan ini akan diintegrasikan/dibahas pada pembahasan evaluasi/analisis kinerja sasaran strategis pertama.



Gambar 3.6 Monitoring & Evaluasi Manajemen Risiko Organisasi



Gambar 3.7 Diskusi Manajemen Risiko bersama BPKP & Inspektorat



Gambar 3.8 Kendali Internal Manajemen Risiko Bappeda Kaltim



### Sasaran 1:

#### Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran strategis pertama merupakan turunan atau upaya penjabaran dari tujuan pertama. Dengan mekanisme penjelasan yang berbeda, bahwa tujuan pertama dapat dicapai melalui pencapaian sasaran pertama. Sasaran pertama ini akan diukur tingkat kesuksesannya melalui tiga indikator, yakni:

1. Tingkat/persentase konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
2. Tingkat/persentase konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Dokumen Rencana Pembangunan Provinsi
3. Persentase Program Prioritas pembangunan yang Mencapai target

Indikator pertama akan menunjukkan apakah dokumen perencanaan pembangunan telah sepenuhnya dijadikan rujukan atau digunakan oleh perangkat daerah dalam merencanakan kinerjanya. Idealnya, kondisi ini harus terpenuhi untuk memastikan Pembangunan berjalan ke arah yang telah ditetapkan, yakni menuju pencapaian visi Pembangunan daerah. Sementara itu, indikator kedua akan mengukur sinkronisasi antara Perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota. Adanya indikator ini akan mendorong rencana di Bappeda Provinsi untuk memastikan visi, misi, target utama, dan program-program prioritas pembangunan provinsi menjadi rujukan serta memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator ketiga merupakan upaya mengukur capaian program-program utama yang memiliki daya ungkit besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Masing-masing indikator memiliki komponen atau aspek perhitungan yang lebih detail. Masing-masing komponen tersebut diberikan nilai signifikansi yang berbeda. Secara garis besar aspek-aspek dalam ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Aspek-aspek dalam indikator perhitungan kinerja

Indikator	Aspek perhitungan	Bobot
Persentase konsistensi antara DOKRENBANGDA dengan DOKREN.PD	1. Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD/RPD (Target tujuan, sasaran, program)	30
	2. Kesesuaian antara RKPD dengan RENJA (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja)	30



Indikator	Aspek perhitungan	Bobot
	3. Kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD/RPD (Jumlah program dan indikator)	20
	4. Kesesuaian antara tujuan RENSTRA PD dengan sasaran RPJMD/RPD (Jumlah sasaran)	20
Persentase Keselarasan antara DOKRENBANG Kabupaten/Kota dengan DOKRENBANG Provinsi	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi dokumen rencana pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	50
	Persentase kabupaten/Kota yang prioritas pembangunannya selaras dengan Provinsi	25
	Persentase Indikator sasaran provinsi yang mendapat dukungan program dari kabupaten/kota	25
Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	Persentase Indikator Program Prioritas yang mencapai target	-

### 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran pertama pada periode pertama pembangunan jangka menengah 2024 – 2026 menunjukkan kondisi yang positif, yakni seluruh realisasi berada di atas target yang telah ditetapkan. Secara mendetail disajikan pada tabel 3.10

Tabel 3.11 Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 1

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase konsistensi antara DOKRENBANGDA dengan DOKREN.PD	%	92,00	96,43	104,81
Persentase Keselarasan antara DOKRENBANG Kabupaten/Kota dengan DOKRENBANG Provinsi	%	91,00	92,04	101,41
Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	%	80,00	88,00	110,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>105,41</b>



Seluruh indikator pada sasaran strategis pertama telah mencapai target, bahkan melampaui target. Secara agregat, jika ketiga indikator tersebut diambil nilai rerata, maka capaian dari sasaran pertama mencapai 105,41% atau masuk kategori capaian kinerja "Sangat Tinggi."

## 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja tahun 2024 tidak dilakukan perbandingan terhadap tahun sebelumnya (2023) mengingat terdapat perbedaan indikator yang digunakan. Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan jangka menengah melalui RPD 2024 – 2026. Perhitungan sebelumnya dilakukan pada tahun 2022. Di mana nilai ini dijadikan sebagai nilai tahun awal/dasar (baseline).

Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja sasaran 2 tahun penilaian dengan tahun dasar (2022)

Indikator	2022 (Baseline)	2024	
		Target	Realisasi
Persentase konsistensi antara DOKRENBANGDA dengan DOKREN.PD	89,94	92,00	96,43
Persentase Keselarasan antara DOKRENBANG Kabupaten/Kota dengan DOKRENBANG Provinsi	89,00	91,00	92,04
Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	76,56	80,00	88,00

Dari tabel 3.12 dapat terlihat bahwa realisasi seluruh indikator sasaran telah berada di atas perhitungan tahun dasar/awal dan realisasi tersebut seluruhnya di atas target yang telah ditetapkan. Kondisi ini serupa dengan sebagaimana disampaikan pada poin analisis sebelumnya.



### 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bappeda 2024 - 2026)

Tabel 3.13 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
Persentase konsistensi antara DOKRENBANGDA dengan DOKREN.PD	%	92,00	96,43	Capaian 104,81%
Persentase Keselarasan antara DOKRENBANG Kabupaten/Kota dengan DOKRENBANG Provinsi	%	91,00	92,04	Capaian 101,41%
Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	%	80,00	88,00	Capaian 110%

Tahun pertama kinerja pembangunan jangka menengah 2024 – 2026 menunjukkan hasil positif. Seluruh target sasaran strategis pertama telah tercapai bahkan seluruhnya melampaui target. Keselarasan dan sinkronisasi rencana pembangunan disertai dengan menjaga kualitas belanja juga dapat berperan dalam mengarahkan program-program prioritas mencapai target yang telah ditetapkan.

### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

Sasaran strategis kedua menunjukkan kinerja yang baik. Realisasi pada awal periode perencanaan jangka menengah telah melampaui target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja sasaran pertama ini antara lain:

- Tersedianya aplikasi SIPD yang berperan dalam membantu proses kendali keselarasan antara DOKRENBANGDA dan DOKREN Perangkat Daerah, keselarasan antar penjenjangan kinerja, bahkan keselarasan/sinkronisasi pada proses perencanaan dan penganggaran
- Ketelitian dalam proses perencanaan, terutama dalam proses analisis rencana kegiatan serta sub kegiatan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah
- Adanya atensi dari KPK terhadap melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), di mana upaya pencegahan korupsi dilakukan sejak tahap perencanaan. Selain itu, MCP juga



menekankan kepatuhan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk proses perencanaan dan penganggaran

- Meningkatnya kualitas proses pembahasan dan verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah serta proses verifikasi anggaran perangkat daerah dengan mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi dan komunikasi yang baik serta efektif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- Adanya proses Review APIP dalam proses perencanaan dan penganggaran

Beberapa hal yang dilakukan sebagai solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian sasaran pertama, antara lain:

- Menyusun perencanaan kinerja hingga level belanja sejak penyusunan Rancangan Awal RKPD dan RENJA untuk dapat dilakukan identifikasi dan penelaahan terhadap kualitas belanja. Mekanisme ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa belanja yang dilaksanakan merupakan belanja yang mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mekanisme ini melibatkan seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama dari BPKAD sebagai mitra kerja Bappeda
- Mengoptimalkan penggunaan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Penggunaan aplikasi SIPD sangat membantu dalam proses sinkronisasi belanja agar belanja yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappeda Kaltim. Meningkatnya pemahaman dan kompetensi SDM merupakan unsur signifikan untuk menjaga substansi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran. Selain itu, meningkatnya kompetensi SDM di Bappeda Kaltim dapat membantu dalam memberikan pemahaman kepada berbagai stakeholder mengenai posisi strategis proses perencanaan dan hubungannya dengan proses penganggaran
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar perencanaan pada berbagai tingkat pemerintahan berjalan secara selaras dan saling mendukung.

## 5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam laporan ini merujuk pada penggunaan alokasi sumber dana yang diberikan. Substansi efisiensi tidak berbeda dengan efisiensi pada tujuan pertama mengingat sasaran pertama merupakan langkah untuk mencapai tujuan pertama dan keduanya berada pada penjenjangan kinerja yang sama. Tabel efisiensi menunjukkan bahwa untuk mencapai target (bahkan melebihi target) yang telah ditetapkan, sasaran pertama hanya menggunakan 86,23% dari dana yang tersedia. Nilai tersebut menunjukkan adanya efisiensi sumber daya dalam pencapaian sasaran pertama. Kinerja masing-masing indikator



tidak dapat dihitung masing-masing mengingat pencapaian satu indikator dapat dilakukan melalui berbagai program yang mendukung pencapaian sasaran pertama.

Tabel 3.14 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran (sasaran 1)

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kinerja anggaran (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antara DOKRENBANGDA dengan DOKREN.PD	104,81%	86,23%	19,17%
	Persentase Keselarasan antara DOKRENBANG Kabupaten/Kota dengan DOKRENBANG Provinsi	101,41%		
	Persentase Program Prioritas Pembangunan yang Mencapai Target	110%		

Anggaran untuk melaksanakan sasaran pertama pada tahun 2024 adalah sebesar 22,856,314,152. Dari nilai tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar 19,708,672,056 atau sebesar 86,23%. Sementara itu, capaian kinerja sasaran strategis secara agregat (menggunakan rata-rata) mencapai 105,41%, sehingga untuk pencapaian sasaran pertama, terdapat efisiensi sebesar 19,17%.



## 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran kinerja pertama utamanya didukung oleh program/kegiatan pada bidang P2EPD dan seluruh bidang perencana. Tabel 3.14 menyajikan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mencapai target kinerja sasaran strategis pertama

Tabel 3.15 Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis pertama

PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	%	100	85	85
	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan	%	100	95.49	95.49
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	Dok	3	3	100
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dok	1	1	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	100
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2	2	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dok	3	3	100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Data dan Informasi	115	115	100
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok	3	3	100



PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	80	116	145
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	40	220	550
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	1	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	5	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3	3	100
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	3	3	100
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
	<b>Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	%	100	95	95
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100



PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	10	10	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	10	10	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	2	2	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	10	10	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	10	10	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	100



PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	%	100	98	98
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9	9	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	9	9	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	6	6	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	3	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	3	100



PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	5	5	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	%	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100

## Sasaran 2:

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah

Sasaran strategis ketiga dari kinerja Bappeda Kaltim berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan layanan publik yang diberikan Bappeda kepada berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja. Terdapat dua indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sasaran kedua ini, yakni Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.



Gambar 3.9 Halaman Utama Website Bappeda Kaltim (<http://bappeda.kaltimprov.go.id>)



Gambar 3.10 Diskusi bersama Inspektorat Kaltim terkait Penerapan SAKIP Perangkat Daerah



## 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.16 Indikator, target, realisasi, & capaian kinerja sasaran strategis 2

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)	Nilai	79	80,90	102,41
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	86,38	105,99

Kedua indikator di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis kedua berada pada kategori "Sangat Tinggi". Capaian ini memberikan gambaran bahwa Bappeda Kaltim memberikan pelayanan yang baik sesuai tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas tersebut pun, Bappeda Kaltim telah menerapkan prinsip akuntabel. Nilai AKIP tahun 2023 (penilaian tahun 2024) masuk dalam kategori A dengan nilai 80,90.



Gambar 3.11 Keikutsertaan Bappeda Kaltim dalam Pesta Rakyat Kaltim.



2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya (Sasaran 2)

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2022	2023	2024	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)	Nilai	74,56	76,40	80,90	Peningkatan nilai AKIP organisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	79,60	79,75	86,38	Kepuasan masyarakat meningkat

Peningkatan nilai AKIP dan tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa kinerja organisasi dapat dipertahankan bahkan secara perlahan ditingkatkan.



**MONITORING & EVALUASI KINERJA INTERNAL**

- o Rapat kendali internal dilakukan tiap bulan hingga level staf
- o Rapat kendali dipimpin oleh Kepala Bappeda
- o Pemantauan progress kinerja dilakukan tiap bulan (E-Kinerja), & tiap triwulan (E-SAKIP & EVDOREN)



**Penggunaan E-Kinerja (Monitoring bulanan)**



**Penggunaan E-SAKIP (Monitoring triwulan)**



Gambar 3.12 Monitoring & Evaluasi Kinerja Internal secara berkala oleh pimpinan organisasi



### 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Bappeda 2024 - 2026)

Tabel 3.18 Perbandingan realisasi kinerja tahun penilaian dengan target jangka menengah (Sas 2)

Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Keterangan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)	Nilai	79	80,90	Capaian 102,41
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	85	86,38	Capaian 105,99

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah 2024 - 2026. Pada periode ini, seluruh target kinerja telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

### 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan

#### a. Analisis penyebab peningkatan kinerja

Kinerja sasaran 2 seluruhnya mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi target. Beberapa hal/faktor yang mendorong keberhasilan ini antara lain:

- Prinsip kerja BerAKHLAK telah disosialisasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan. Hal ini memberikan pegangan kepada seluruh personel Bappeda dalam melaksanakan tugas
- Pelaksanaan belanja tepat sasaran serta evaluasi kinerja dan belanja secara berkala. Belanja yang dilaksanakan pada tahun 2024 mengalami pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran ini merupakan upaya untuk melakukan identifikasi terhadap belanja-belanja yang telah mencapai target, belanja yang kurang efisien, untuk kemudian diarahkan ke belanja lain yang dapat mempercepat capaian target organisasi. Langkah ini juga merupakan bentuk tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi implementasi SAKIP tahun 2023 (penilaian tahun 2024), yakni untuk melakukan evaluasi terhadap belanja yang sifatnya kurang efisien.
- Penyediaan sarana prasarana secara tepat guna baik pelayanan terhadap kebutuhan kerja personel Bappeda Kaltim maupun upaya peningkatan layanan untuk pihak eksternal. Peningkatan layanan untuk pengguna layanan eksternal meliputi publikasi dan penyediaan informasi serta data perencanaan pembangunan yang termutakhir dan mudah diakses. Hal ini termasuk penggunaan teknologi dan informasi dalam penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder pembangunan serta masyarakat luas.



- Penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan, termasuk di dalamnya upaya meningkatkan kompetensi personel Bappeda melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan (DIKLAT). Langkah ini dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki reputasi positif baik untuk kompetensi perencanaan maupun peningkatan keterampilan teknis lainnya.
- Pemahaman yang semakin baik dalam penerapan prinsip akuntabel untuk mewujudkan *good governance*. Tumbuhnya pemahaman dan kesadaran personel Bappeda untuk menerapkan prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas, salah satunya yakni dengan pemahaman pentingnya mencatat progress kinerja melalui sistem yang telah tersedia (E-Kinerja dan E-SAKIP)

Tabel 3.19 Pendidikan & Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi personel Bappeda Tahun 2024

NO	JUDUL/TEMA DIKLAT
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2	Pelatihan Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
3	Pembinaan Penyelenggaraan E-Purchasing melalui Katalog Elektronik dengan Metode Negosiasi Harga dan Mini Kompetensi pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4	Bimtek E-Katalog versi 6.0 oleh PT. Airmas
5	Bimtek Mobile Jurnalisme - Kompas
6	Pelatihan dan Ujian Bendaharawan bagi ASN
7	Diklat Policy Brief dan Policy paper
8	Bimbingan Teknis penerapan Manajemen Energi pada Gedung Pemerintahan
9	Publik Speaking and Effective Communication Skill
10	Diklat Penyusunan ANJAB dan ABK
11	Pelatihan dan Pembekalan Pengelolaan Arsip Dinamis
12	Bimbingan Teknis Intermediate Microsoft Excel
13	Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) PD 2024 lingkup Pemprov Kaltim
14	Bimbingan Terkait Kebijakan Jabatan Fungsional Perencana
15	Coaching Clinic Kegiatan Fasilitas Entry Penyusunan Pendanaan (Tagging) Sumber Dana Belanja Tahun 2025
16	Diklat Kearsipan dan Studi Tiru ke ANRI



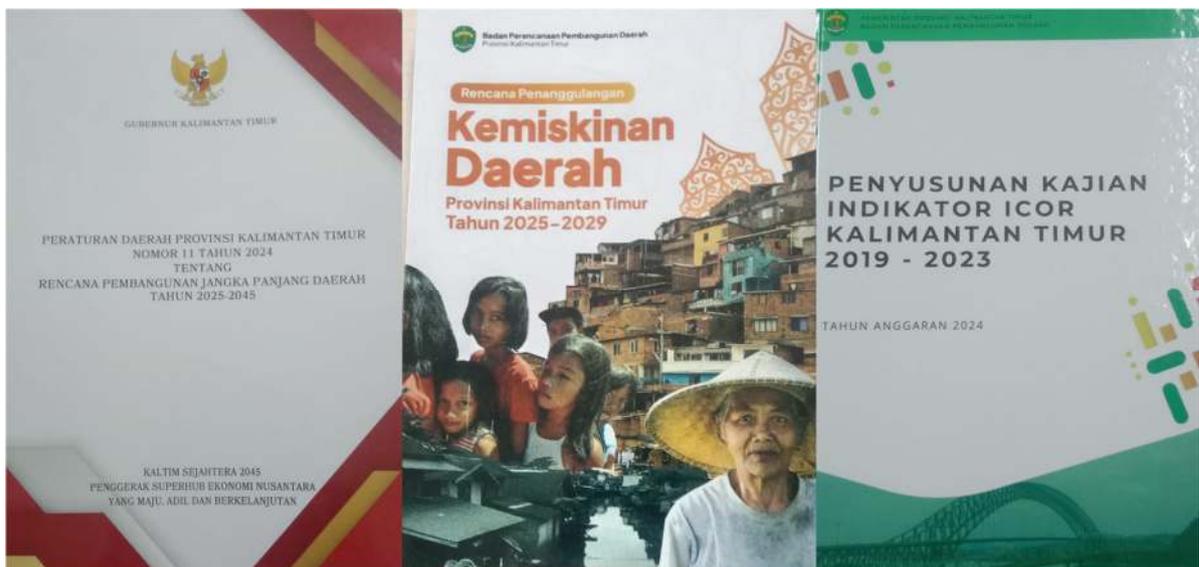
- b. Langkah solutif yang telah dilakukan (langkah perbaikan yang dilakukan)
- Meningkatkan konsistensi pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas. Hal ini termasuk penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas serta melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko organisasi
  - Dalam hal menjangkau pendapat pengguna layanan Bappeda guna memperoleh nilai kepuasan pengguna layanan, telah dilakukan upaya perluasan penyebaran kuesioner pada kegiatan-kegiatan utama untuk bertemu dan berinteraksi dengan pengguna layanan Bappeda Kaltim.
  - Memperluas jangkauan penyebarluasan informasi terkait layanan dan kinerja Bappeda Kaltim termasuk capaian-capaian pembangunan daerah. Selain melalui website institusi, penyebarluasan informasi layanan Bappeda juga dilakukan melalui sosial media serta keikutsertaan dalam berbagai acara pembangunan daerah
  - Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda Kaltim baik untuk kompetensi perencanaan maupun kompetensi teknis lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi personel Bappeda yang memberikan pelayanan terhadap produk/output hingga outcome dan sasaran organisasi.
- c. Langkah kedepan untuk peningkatan kinerja
- Memperkuat kapasitas dan kompetensi SDM Bappeda agar dapat memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi serta memenuhi/melaksanakan prinsip akuntabel dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) lainnya
  - Melakukan identifikasi titik krusial untuk peningkatan implementasi AKIP organisasi
  - Mengupayakan kerja secara tersistem agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan lebih efisien baik dari sisi waktu maupun biaya

Beberapa output **utama** dari kinerja BAPPEDA tahun 2024 yang merupakan bahan utama dalam pelayanan kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi BAPPEDA antara lain:

1. Peraturan Daerah No. 11 tahun 2024 tentang RPJPD Kaltim 2025 - 2045
2. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 26 tahun 2024 tentang RKPD 2025
3. Peraturan Gubernur Kaltim Kaltim Nomor 31 tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kalimantan Timur tahun 2024
4. Laporan hasil verifikasi RENJA Perangkat Daerah 2025
5. Laporan hasil verifikasi Perubahan RENJA Perangkat Daerah 2024
6. Keputusan Gubernur hasil evaluasi RANPERDA RPJPD Kab/Kota (10 Dokumen)
7. Surat hasil fasilitasi RANPERKADA RKPD Kab/Kota tahun 2025 (10 Dokumen)
8. Surat hasil fasilitasi RANPERKADA Perubahan RKPD Kab/Kota tahun 2024 (10 Dokumen)



9. Hasil Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah & Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kalimantan Timur 2024: 93,11
11. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025 - 2029
12. Laporan Konvergensi Stunting tahun 2024
13. Pelaksanaan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2024
14. Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan & Gizi tahun 2025 - 2029
15. Rancangan Grand Design Ketahanan Pangan 2025-2045
16. Laporan pelaksanaan SDGs tahun 2024
17. Kajian Pengembangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (3 Kabupaten - Paser, PPU dan Kukar)



Gambar 3.13 Beberapa produk/output kinerja Bappeda tahun 2024

### 5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran pertama telah mencapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Dari sisi penggunaan dana, pelaksanaan berbagai kegiatan dan belanja untuk mendukung capaian tersebut adalah sebesar 93,81%. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja sebesar 104,2% (rata-rata untuk dua indikator sasaran 1) pada tahun 2024, terdapat efisiensi sebesar 10,39%

Tabel 3.20 Identifikasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sasaran 2

Sasaran strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Kinerja anggaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (AKIP)	102,41	93,81	10,39
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	105,99		



Total alokasi dana yang dianggarkan untuk pencapaian sasaran kedua adalah sebesar 49.451.795.092. Penggunaan dana hingga akhir tahun adalah sebesar 46.392.783.905. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi dikarenakan capaian kinerja menjangkau 104% dengan penggunaan dana sebesar 93,81%.

#### 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran kinerja terkait pelayanan organisasi dan penerapan prinsip akuntabel serta good governance lainnya utamanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program/kegiatan/sub. Kegiatan pada Sekretariat Bappeda Kaltim melalui "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi". Pelaksanaan program ini memperoleh alokasi sebesar 49.451.795.092. Tabel 3.20 menyajikan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua.

Tabel 3.21 Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan & Rencana Aksi pendukung capaian sasaran strategis 2

PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indks	80	109	136,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	97	100	103,09
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90	83	92,22



PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	7	7	100
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	146	146
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	1	1	100



PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	101	147	145,54
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	%	96	100	104,17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	22	22	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	13	13	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	9	9	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28	28	100



PROG/KEG/SUB. KEG	INDIKATOR	METRIK	2024		
			TRGT	REALISASI	CAPAIAN
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	1	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	100	111,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	100
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	27	27	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	166	166	100
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	100
Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100
Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	20	100



#### D. Perbandingan dengan kinerja provinsi & Perbaikan kinerja organisasi

##### 1) Beberapa aspek perbandingan kinerja Bappeda dengan kinerja level provinsi

Realisasi dan capaian kinerja antara perangkat daerah (Bappeda Kaltim) dengan kinerja pada level provinsi dapat dilakukan jika terdapat indikator kinerja yang sama/sepadan. Dalam hal ini, perbandingan kinerja dapat dilakukan pada dua aspek, yakni nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Realisasi Anggaran.

Kinerja yang diukur berdasarkan penggunaan anggaran menunjukkan bahwa baik Bappeda Kaltim maupun Pemprov Kaltim realisasinya di atas 91%. Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai **91,58**. Sementara itu, realisasi anggaran Bappeda Kaltim tahun 2023 mencapai **91,42%**.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, Tahun 2024, Pemprov Kaltim memperoleh nilai SAKIP sebesar **78,74** dengan predikat akuntabilitas kinerja **BB**. Sementara itu, nilai SAKIP Bappeda Kaltim tahun 2024 adalah **80,90** dengan predikat kinerja **A**. Dalam konteks kinerja Pemprov dan penilaian SAKIP, Bappeda merupakan bagian dari klaster utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian nilai AKIP Bappeda berada di atas target yang ditetapkan pada tahun 2024, yakni dengan nilai 79.

##### 2) Perbaikan Kinerja Organisasi

Identifikasi dan analisis kinerja Bappeda tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan pada beberapa aspek, terutama aspek yang bersifat strategis. Tugas dan fungsi utama Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah menunjukkan kinerja optimal dan berada pada jalur sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan bahkan pada tahun 2024 capaian seluruh sasaran strategis berada di atas target yang telah ditetapkan. Tahun 2023, capaian kinerja Bappeda Kaltim adalah sebesar 92,98%. Sementara, tahun 2024 capaian kinerja Bappeda Kaltim mencapai 105,29%. Peningkatan capaian ini salah satunya didukung oleh aksi/tindak lanjut organisasi terhadap hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik tahun 2023 maupun tahun 2024. Tiga rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP yakni:

1. Dalam pencapaian kinerja memperhitungkan efisiensi penggunaan anggaran
2. Berupaya maksimal untuk meningkatkan nilai pada seluruh komponen penilaian SAKIP
3. Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut membawa pengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Pengaruh positif dimaksud terlihat antara lain dari adanya efisiensi anggaran di



seluruh sasaran strategis. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 19,17% pada tujuan dan sasaran pertama dan sebesar 10,39% pada sasaran kedua.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabel dan prinsip-prinsip *good governance* lainnya dalam kinerja organisasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa kinerja organisasi yang telah baik atau berada pada jalur yang tepat dapat dipertahankan, hal-hal yang menghambat kinerja dapat diidentifikasi dan ditemukenali solusinya, serta peningkatan kinerja organisasi dapat dicapai. Dengan adanya pemantauan atau kendali secara periodik, dapat ditemukan titik-titik kuat organisasi yang dapat mendukung kinerja serta titik-titik lemah yang perlu diberi perhatian agar kinerja dapat meningkat dan mengalami perbaikan. Refleksi terhadap perbaikan kinerja yang dicapai pada tahun 2024, Bappeda Kaltim berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari proses kerja serta menindaklanjuti evaluasi yang dihasilkan dari berbagai tahap evaluasi dan penilaian kinerja.



Gambar 3.14 Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah



Gambar 3.15 Perolehan Bhumandala Rajata dalam Bhumandala Award 2024



Gambar 3.16 Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024



Gambar 3.17 Kegiatan Monitoring & Evaluasi dan Kunjungan Lapangan



Gambar 3.18 Pendampingan Kunjungan Lapangan Bapak Pj. Gubernur Kaltim



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2024 disusun berdasarkan pengukuran capaian strategis organisasi sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda tahun 2024 – 2026. Tahun 2024, realisasi kinerja anggaran Bappeda Provinsi Kaltim mencapai 91,42%. Dari aspek realisasi tujuan dan sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bappeda tahun 2024 – 2026, capaian kinerja Bappeda mencapai 105,29%. Uraian capaian masing-masing tujuan dan sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, yakni **”Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas” dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah** menunjukkan capaian kinerja sebesar 107,39%.
2. Sasaran pertama, yakni **”Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”** yang dinilai menggunakan tiga indikator, menunjukkan capaian sebesar 105,32%
3. Sasaran kedua, yakni **”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan layanan publik perangkat daerah”** yang dinilai menggunakan dua indikator menunjukkan capaian sebesar 104,2%
4. Dari ketiga kategori yang menjadi IKU organisasi tersebut, rata-rata capaian organisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 105,29%
5. Realisasi anggaran Bappeda Kaltim tahun 2024 adalah sebesar 91,42% sehingga secara keseluruhan (perangkat daerah), terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,87%

Selain hal-hal berkaitan dengan evaluasi capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah, hasil evaluasi penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga menjadi poin perhatian pimpinan dalam mengarahkan kinerja organisasi. Pasca diterimanya hasil evaluasi dari Inspektorat Kalimantan Timur pada Bulan Juli 2024, Bappeda Kaltim melakukan upaya perbaikan, yakni dengan melaksanakan pemantauan/pengendalian kinerja dengan lebih konsisten, penuh komitmen, serta yang memenuhi prinsip akuntabel. Salah satunya adalah melaksanakan kendali kinerja personel dalam organisasi yang dipantau tidak hanya tiap tiga bulan (triwulan) namun dilakukan tiap bulan.

Upaya perbaikan yang dilakukan ini perlahan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja organisasi ditinjau dari penggunaan anggaran untuk program/kegiatan yang telah diagendakan serta rata-rata capaian kinerja. Tahun 2024, selain kinerja yang meningkat, Bappeda juga menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.



## **B. Upaya Perbaikan Kedepan**

1. Menjadikan hasil evaluasi sebagai salah satu aspek penting dalam perbaikan kinerja, terutama kinerja strategis organisasi
2. Memperkuat pemantauan kendali pelaksanaan program/kegiatan agar memiliki progress yang baik, tepat sasaran, menjalankan prinsip yang akuntabel serta prinsip pemerintahan yang baik (good governance) lainnya
3. Mengimplemetasikan pemantauan perjanjian kinerja hingga level staf dengan durasi atau periode waktu bulanan dengan memanfaatkan teknologi agar dapat lebih efisien serta konsisten
4. Memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappeda kaltim untuk mendukung kinerja organisasi
5. Melakukan review dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang digunakan untuk perbaikan kinerja kedepan terutama dalam proses penyusunan kinerja strategis organisasi kedepan (2025 – 2029)



Tabel 4.1 Informasi Capaian Program prioritas Tahun 2024

PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00	53,57	53,57	Tidak mencapai target	DISDIKBUD
	Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100,00	81,5	81,50	Tidak mencapai target	DISDIKBUD
	Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	88,48	58,32	65,91	Tidak mencapai target	DISDIKBUD
	Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	87,49	71,02	81,17	Tidak mencapai target	DISDIKBUD
	Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	94,87	71,84	75,72	Tidak mencapai target	DISDIKBUD
	Persentase Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	67,69	73,37	108,39	Mencapai Target	DISDIKBUD
	Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	60,34	66,53	110,26	Mencapai Target	DISDIKBUD
	Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,00	75,8	95,95	Mencapai Target	DISDIKBUD
	Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	94,00	89,54	95,26	Mencapai Target	DISDIKBUD
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100,00	99,69	99,69	Mencapai Target	DISDIKBUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Rasio	10,80	8	125,93	Mencapai Target	DINKES
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	65,00	75,63	116,35	Mencapai Target	DISNAKERTRANS
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	60,35	104,70	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	400,00	400	100,00	Mencapai Target	DKP3A
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,16	184,00	Mencapai Target	DISHUT
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45	Mencapai Target	DISHUT



PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	PERANGKAT DAERAH
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850	1.632,96	192,11	Mencapai Target	DISHUT
	Produksi Hasil Hutan Kayu	m <sup>3</sup> /tahun	4.420.000	6.293.432,95	142,39	Mencapai Target	DISHUT
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	20,00	20,00	100,00	Mencapai Target	DISPERINDAGK OPUKM
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	5,00	5,02	100,40	Mencapai Target	DISPERINDAGK OPUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	67,00	28,00	41,79	Tidak mencapai target	DISPERINDAGK OPUKM
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5,20	0,00	0,00	Tidak mencapai target	DISPERINDAGK OPUKM
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	%	30,00	30,00	100,00	Mencapai Target	DISPAR
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	Mencapai Target	DPMPSTP
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	Mencapai Target	DPMPSTP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	11,00	11,00	100,00	Mencapai Target	DPMPSTP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2,00	2,00	100,00	Mencapai Target	DPMPSTP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Kebun yang dibangun	Ha	50.702,00	62.772,00	123,81	Mencapai Target	DISBUN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,36	25,00	98,58	Mencapai Target	DISBUN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	%	26,50	30,77	116,11	Mencapai Target	DISBUN
	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	11,15	13,48	120,90	Mencapai Target	DISBUN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,60	97,64	100,04	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,30	89,06	103,20	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya	Kecamatan	1,00	1,00	100,00	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH



PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	PERANGKAT DAERAH
	Persentase daerah rawan pangan	%	0,00	0,00	200,00	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	34,00	34,00	100,00	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	41,39	79,19	191,33	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	39,29	40,29	102,55	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,50	32,00	90,14	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	77,00	77,04	100,05	Mencapai Target	DINAS PANGAN TPH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54	107,10	107,59	Mencapai Target	DISNAK-KESWAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	96,21	95,53	99,29	Mencapai Target	DISNAK-KESWAN
	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53	112,31	128,31	Mencapai Target	DISNAK-KESWAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	95,41	103,94	Mencapai Target	DISNAK-KESWAN
	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11	111,29	117,01	Mencapai Target	DISNAK-KESWAN
	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	98,68	164,69	166,89	Mencapai Target	DISNAK-KESWAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,74	99,99	100,25	Mencapai Target	DISNAK-KESWAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190.000	214.695	113,00	Mencapai Target	DKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	200.000	202.000	101,00	Mencapai Target	DKP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	7,00	7,00	100,00	Mencapai Target	DKP
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	12.936	13.544	104,70	Mencapai Target	DINSOS



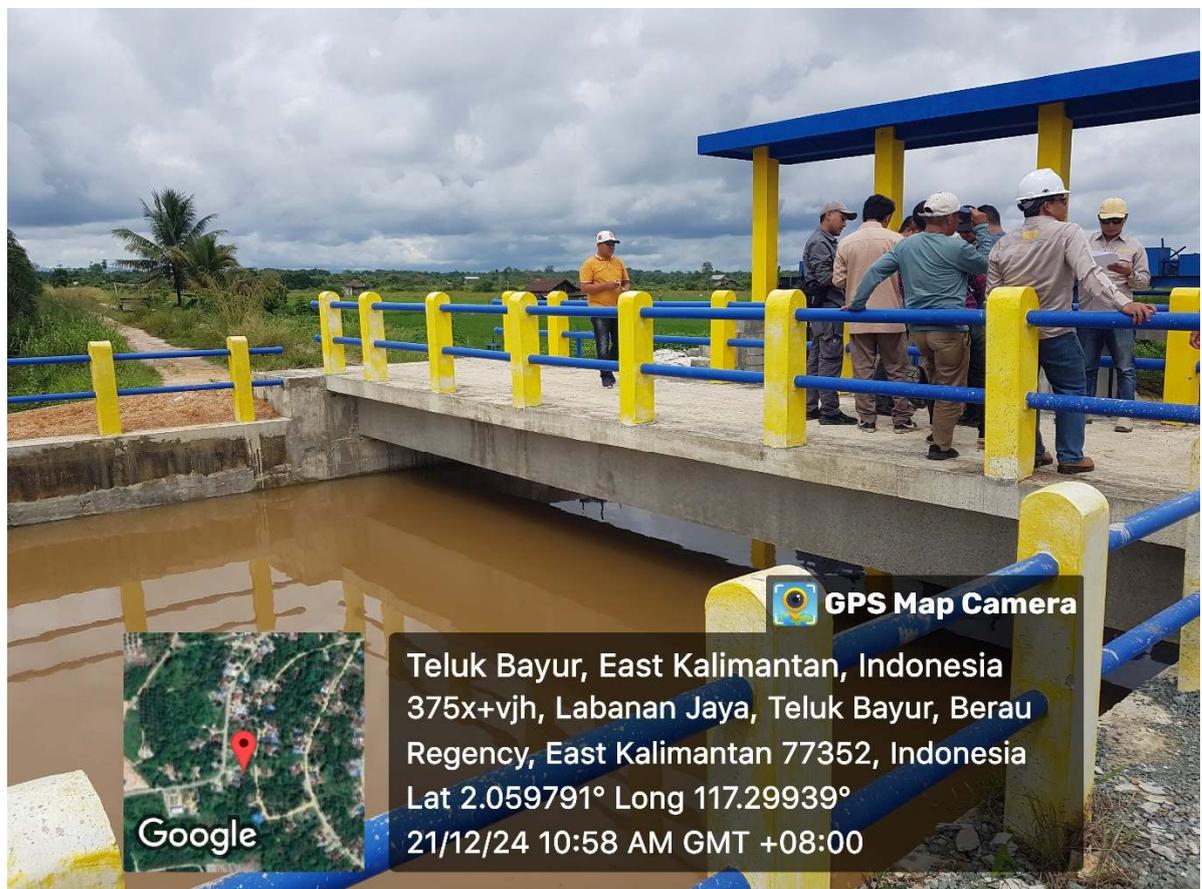
PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	PERANGKAT DAERAH
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	25,00	41,02	164,08	Mencapai Target	DPMPD
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,10	111,11	102,78	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	16,00	12,87	80,44	Tidak mencapai target	DISPERINDAGK OPUKM
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85,00	69,00	81,18	Tidak mencapai target	DISPERINDAGK OPUKM
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175	144	117,71	Mencapai Target	DISHUB
	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82	82	100,00	Mencapai Target	DISHUB
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	Angka	0,006	0	200,00	Mencapai Target	DISHUB
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas Jalan	1	1	100,00	Mencapai Target	DPUPRPERA
	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	82,09	82,21	100,15	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	9.544	9.956	104,32	Mencapai Target	DPUPRPERA
	Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	2,8	3,1	110,71	Mencapai Target	DPUPRPERA
	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	liter/detik	126	135	107,14	Mencapai Target	DPUPRPERA
	Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	77	77,4	100,52	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	11,15	13,61	122,06	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	57,65	59,77	103,68	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	60,35	104,70	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83,2	83,2	100,00	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	111,11	102,78	Mencapai Target	DPUPRPERA
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,1	34,26	100,47	Mencapai Target	DESDM



PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	PERANGKAT DAERAH
	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250	178,4	71,36	Tidak mencapai target	DESDM
	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100	100	100,00	Mencapai Target	DESDM
	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97	91,71	98,64	Mencapai Target	DESDM
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤ (tercemar ringan) Indeks	5	2,65	147,00	Mencapai Target	DLH
	Indeks Standar Pencemar Udara	(Baik) Indeks	48	35	72,92	Tidak mencapai target	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	0,16	184,00	Mencapai Target	DISHUT
	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,74	157,45	Mencapai Target	DISHUT
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850	1.632,96	192,11	Mencapai Target	DISHUT
	Produksi Hasil Hutan Kayu	m <sup>3</sup> /tahun	4.420.000	6.293.432,95	142,39	Mencapai Target	DISHUT
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi Yang Dikelola	Ha	610.540,98	610.540,98	100,00	Mencapai Target	DISHUT
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS Yang Dikelola	Ha	10.104	10.104	100,00	Mencapai Target	DISHUT
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	20	21	105,00	Mencapai Target	DISHUT
	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Ha	20.000	28.561	142,81	Mencapai Target	DISHUT
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100	100,31	100,31	Mencapai Target	DISBUN
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,1	34,26	100,47	Mencapai Target	DESDM
	Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250	178,4	71,36	Tidak mencapai target	DESDM
	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100	100	100,00	Mencapai Target	DESDM



PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET	PERANGKAT DAERAH
	Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97	91,71	98,64	Mencapai Target	DESDM
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	243.246,516	1.180.525,00	485,32	Mencapai Target	DESDM
	Persentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	43,76	43,98	100,50	Mencapai Target	DESDM
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	33,56	52,44	156,26	Mencapai Target	DESDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	90,43	100,48	Mencapai Target	BKD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	86	120,3	139,88	Mencapai Target	BPSDM
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kelembagaan	Indeks	72	88,217	122,52	Mencapai Target	BIRO ORG
	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44	47,13	107,11	Mencapai Target	BIRO ORG
	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	Perangkat Daerah	1	4	400,00	Mencapai Target	BIRO ORG
	Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)	%	40	81,08	202,70	Mencapai Target	BIRO ORG
	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	86	86,11	100,13	Mencapai Target	BIRO ORG
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80	80	100,00	Mencapai Target	DISKOMINFO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100	100	100,00	Mencapai Target	INSPEKTORAT







**DOKUMEN HASIL PENILAIAN  
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)  
PEMERINTAH PROVINSI  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

**Total Nilai : 93,11  
Predikat : Sangat Baik**



**DOKUMEN HASIL PENILAIAN  
INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)  
PEMERINTAH PROVINSI**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)  
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2024**





